

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Kemimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7-10-1981 Nomor: 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah memandang perlu untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud kedalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen demi keseragaman pelaksanaannya ;

- Langsung : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1979 jo. Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (diundangkan pada tanggal 16-10-1979), dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1979 Seri D Nomor 1, jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, (diundangkan pada tanggal : 22-6-1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1981 Seri D Nomor 3), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf g " menjadi berbunyi :

g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B. Pasal 7, menjadi berbunyi :

Pasal 7

(1) Bank Pasar dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;

(2)

- (2) selaku seorang anggota direksi berturut-turut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan selengai Direktur Utama dan bantuan dilakukan oleh direktur ;
- (3) Direktur Utama berkenan yang jumlah anggota II pada Pasal ini dan para Direktur menurut bidangnya masing-masing bentuknya jumlahnya jadi Kepala Direktur Utama.

C. Pasal 8, menjadi berbunyi :

Pasal 8

Syarat-syarat Anggota Direksi :

1. Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia ;
2. Anggota Direksi memiliki kualitas serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
3. Anggota Direksi tidak diperlukan lagi yang pelaksanaan atau jabatan eksekutif lainnya, tanpa pemotongan gaji dari Negera Daerah;
4. Anggota Direksi bertempat tinggal di luar kedudukan Perusahaan Daerah - Bank Paser;
5. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negera dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
6. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis besamping, termasuk menantu dan ipar;
7. Jika sesudah pengangkatan mereka masih dalam keluarga keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

D. Pasal 9, menjadi berbunyi :

Pasal 9

Pengangkatan Anggota Direksi :

1. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kerilai setelah masa jabataunya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.
2. Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dilakukan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
3. Setiap persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan dilampukannya surat resmi/identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang mencantumkan pendidikan, pengalaman kerja dan pas foto (ukuran A 4 : C).
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik lurus maupun garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan.
4. Permohonan persetujuan prinsip dalam ayat (3) Pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir ;
5. Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;

E. Pasal 10, menjadi berbunyi :

Pasal 10

Pemberhentian Anggota Direksi :

1. Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah noskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Perintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap menggantikannya Perusahaan Daerah Bank Paser atau bertindakan dengan kepentingan Negara.
 - d. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar.
2. Khusus dalam hal diduga dapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan di berhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.
3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasau-alasan yang menyebutkan pemberhentian sementara tersebut.
4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberi hukum tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
 - b. Dalam Sidang itu Badan Pengawas menutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat 4 pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberi hukum menurut ketentuan ayat 3 pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat 2 pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
 - e. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat 4 huruf c ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun Badan Pengawas maka fihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian sementara termasuk diterimanya. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua fihak yang bersangkutan.
 - f. Apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf e ayat ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- F. Judul BAB VI, SEMULA PEMERIKSAAN harus baca BADAN PENGAWAS.

G. Pasal 14, menjadi berbunyi :

PASAL 14

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

H. Sesudah pasal 14, menambah 3 (tiga) Pasal baru, masing-masing Pasal 14, 14b, dan 14c.

Pasal 14a

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas.

1. Anggota Badan Pengawas adalah warga Negara Indonesia.
2. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
3. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
4. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan tindakan yang bercela dibidang Perusahaan Daerah Bank Pasar;
5. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
6. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 14b

Pengangkatan Anggota Pengawas :

1. Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
2. Kepala Daerah menjabat Ketua norangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-Officio;
3. Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD untuk masa jabatan selama-lamanya 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
4. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintahkan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
5. Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan, pengalaman kerja dan pas photo ukuran 4 x 6.
 - b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan.
6. Kepala Daerah yang menjabat Ketua norangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat 4 dan ayat 5 pasal ini.

7. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidaknya diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan.
9. Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Pasar.

Pasal 14c

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas.

1. Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap menguntungkan Perusahaan Daerah Bank Pasar;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.

Pemberhentian termaksud huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat 1 huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah.
3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebutkan pemberhentian sementara tersebut.

4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat 3 Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberi tahu tentang pemberhentian sementaranya.

Jika Anggota Badan Pengawas tersebut tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.

- b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

5. Jika sidang tersebut pada ayat 4 Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka usul pemberhentian dinaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

6. a. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat 4 huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termasuk diterimanya.

- b. Apabila Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tidak mengesahkan keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Kopala Daerah tersebut batas akhir hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut ayat 1 s/d 4 Pasal ini, berlaku juga untuk Ketua sebagai diaksud Pasal 14 b ayat 2 Peraturan Daerah ini, dan disolesaikei sejurus peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- I. Ayat (4) Pasal 1C, dikepung.
- T. Sesudah pasal 1C, ditambah satu Pasal baru yang berbunyi :

Pasal 16a

- (1) Setiap ada penggantian Anggota Direksi dan atau Anggota Badan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kopala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.

K. Ayat (1) Pasal 18, menjadi berbunyi :

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Pegawai/Pekerja Bank Paser diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi Atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan Gaji Pegawai Negeri si-pil yang berlaku.

L. Semua Perkataan " Direktur " pada pasal-pasal 11, 12 dan 13, dibaca " Direktur Utama ".

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT III KEBUMEN
WAKIL WETUA,

f.t.d

(H.M. HAMIFUDIN B.A.).

Kebumen, 19 - 6 - 1982.

BUPATI KEPALA DAERAH TK.I KEBUMEN,

t.t.d

(Drs.H. DADIJONO JUDOPRAJONO).

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kopala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

Tanggal: 6 April 1983 No.188.3/60/1983.

Diundangkan pada tgl. 23-9-1983
dan dimuat dalam Lembaran Daerah
Seri D Nomor 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

f.t.d.

(S O E P A R N O . S.H.).
NIP: 010013919.

DOKUMENTASI HUKUM	
KAB. KEBUMEN	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334
335	336
337	338
339	340
341	342
343	344
345	346
347	348
349	350
351	352
353	354
355	356
357	358
359	360
361	362
363	364
365	366
367	368
369	370
371	372
373	374
375	376
377	378
379	380
381	382
383	384
385	386
387	388
389	390
391	392
393	394
395	396
397	398
399	400
401	402
403	404
405	406
407	408
409	410
411	412
413	414
415	416
417	418
419	420
421	422
423	424
425	426
427	428
429	430
431	432
433	434
435	436
437	438
439	440
441	442
443	444
445	446
447	448
449	450
451	452
453	454
455	456
457	458
459	460
461	462
463	464
465	466
467	468
469	470
471	472
473	474
475	476
477	478
479	480
481	482
483	484
485	486
487	488
489	490
491	492
493	494
495	496
497	498
499	500

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 12 TAHUN 1982

DENGAN

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

I. U M U M :

Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen pertama kali didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1979 Seri D Nomor 1) atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Perusahaan Daerah,

Dalam rangka pembaharuan ijin Usaha Perbankan, pada tahun 1980 oleh Bank Indonesia Cabang Jawa Tengah diminta agar diadakan beberapa perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, sebagai salah satu syarat untuk dapat diberi Ijin Usaha.

Berdasarkan permintaan itu maka dengan Peraturan Daerah Nomor 02 - Tahun 1981 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1981 Seri B Nomor 3) telah diadakan perubahan pertama kali atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1979 dimaksud.

Kini, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri - Nomor 536-666 tanggal 7-10-1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 surat Keputusan ini, maka diadakanlah penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I :

huruf "A" sampai dengan huruf "C" : cukup jelas ;

huruf "D" : pada Pasal "14"/baru, yang hakekatnya adalah mengambil dari Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7-10-1981, dianggap perlu untuk di adakan sedikit Perubahan prinsip Petunjuk itu ialah dengan menambah ketentuan bahwa Kepala Daerah di dalam hendak mengangkat Anggota Badan Pengawas perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (ayat 3).

pada pasal "14c"/baru, yang hakekatnya adalah mengambil dari Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7-10-1981, berdasar pertimbangan bahwa adanya komunikasi yang melakukan/mengalami sesuatu yang dapat diberhentikan sebagai Anggota Badan Pengawas adalah Ketua yang merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Daerah secara ex-officio (Pasal 14b ayat 2) maka demi kepastian hukum, perlu ditambahkan suatu ketentuan sebagai tersebut dalam ayat 7.

huruf "E" : cukup jelas;

huruf "F" : Ketentuan wajib lapor kepada Bank Rakyat Indonesia pada setiap ada penggantian Anggota Direksi dan atau Badan Pengawas, diusulkan agar Bank Rakyat Indonesia selaku Instansi yang diberi tugas mengawasi Bank-Bank selalu dapat mengikuti perkembangan dan dapat memberikan pertimbangan tepat pada waktunya.

huruf "G" dan "H" : cukup jelas ;

Pasal II :

Cukup jelas ;